

ADA POTENSI DISINTEGRASI DI JAMBI

Oleh: Ferdiansyah R¹

Prolog

Jambi merupakan sebuah Provinsi yang berada di tengah-tengah pulau Sumatera. Daerah ini terkenal sebagai salah satu penghasil kelapa sawit dan karet berkualitas ekspor terbesar di Indonesia. Terdiri dari 10 daerah tingkat dua, dengan kondisi geografis yang berbatasan langsung dengan 3 provinsi, dan berada di tengah-tengah, maka provinsi ini merupakan daerah lalu lintas yang padat untuk berbagai macam keperluan dari selatan ke utara maupun sebaliknya. Hal ini tentu membuat Provinsi Jambi menjadi daerah yang sangat strategis dalam sisi perkembangan perekonomian.

Dalam perkembangan politiknya, Provinsi Jambi telah mengalami beberapa kali pergantian Gubernur. Gubernur yang saat ini masih memimpin yaitu Zulkifli Nurdin, merupakan Gubernur hasil pilihan langsung masyarakat melalui Pemilukada pada tahun 2005. Ini merupakan periode kedua kepemimpinannya dan akan segera berganti pada tahun 2010 ini.

Jambi Yang Giat Membangun

Pada satu dekade belakangan, terjadi pembangunan yang sangat gencar di bumi Sepucuk Jambi Sembilan lurah. Terutama pembangunan infrastruktur yang dengan jelas dapat dilihat di sudut-sudut ruas utama Ibukota Provinsi ini yaitu Kotamadya Jambi. Beberapa gedung pusat perbelanjaan atau *mal* berdiri megah seolah menggoda masyarakat Jambi untuk mencicipi

¹ Makalah ini disampaikan pada Konferensi "Disintegration Issues in Indonesia", Fisip for the Nation's National Camp, Universitas Indonesia, Depok, 1-4 Agustus 2010

janji-janji manis kemajuan zaman. Puluhan *real estate* juga memberikan warna baru, hotel-hotel berbintang turut mempercantik keindahan kota, infrastruktur gedung pemerintahan di“*make over*” menjadi lebih modern dan bergaya arsitektur citarasa kontemporer, dan hampir di sepanjang jalan-jalan utama telah dipenuhi oleh ruko-ruko yang menjajakan *item-item* gaya hidup masa kini. Progresivitas ekonomi tampak begitu menggeliat dan sepintas terlihat begitu mengagumkan. Hal yang mungkin tak pernah terpikirkan oleh masyarakat Jambi sebelumnya.

Sebagaimana yang tercatat oleh sejarah, pada masa dahulu masyarakat Jambi pada umumnya tergolong kedalam masyarakat yang tertinggal apabila dibandingkan dengan daerah lain di Pulau Sumatera, baik dari segi kemajuan ekonomi maupun pendidikan. Hal ini begitu melekat, bahkan tidak sedikit orang-orang di penjuru lain Indonesia yang masih menganggap bahwa di Provinsi Jambi belum terjadi banyak kemajuan berarti.

Sebagai seorang mahasiswa yang kini mengenyam pendidikan di Yogyakarta, saya mengetahui persis perihal tersebut. Yogyakarta yang dihuni oleh manusia-manusia dari Sabang sampai Merauke menjadi area pergaulan sekaligus pergulatan pemikiran saya. Banyak dari mereka acapkali *mengolok-olok* saya sebagai seorang anak kepala Suku Anak Dalam, karena memang yang mereka ketahui mengenai Jambi adalah sebuah Provinsi yang di dalamnya terdapat sebuah suku primitif yaitu Suku Kubu, yang sampai saat ini masih hidup nomaden, bergantung pada alam, dan juga belum banyak tersentuh oleh hal-hal yang terkait dengan modernisasi.

Padahal apabila mereka melihat langsung fakta yang terjadi di lapangan, mereka akan tercengang dan takjub, karena di Jambi terutama di Kotamadya Jambi, roda pembangunan telah berjalan dengan begitu gencar dan sangat modern. Hal ini apabila diperhatikan lebih lanjut tentu

tidak lepas dari peranan Gubernur Jambi pada satu dekade belakangan yaitu Zulkifli Nurdin. Seorang saudagar sukses, pengusaha sembako di Provinsi Jambi. Beliau begitu dikagumi oleh para konstituennya, selain karena memiliki putra seorang artis terkenal, juga karena sosoknya yang begitu memperhatikan pembangunan Jambi.

Percepatan pembangunan inilah yang menarik perhatian saya untuk menyelaminya lebih jauh. Apakah benar segala bentuk program pembangunan di daerah Provinsi Jambi terutama di daerah Kotamadya Jambi tempat saya bermukim telah memenuhi idealnya sebuah pembangunan. Dalam subyektivitas saya, pembangunan seharusnya berisafat adil dan menyentuh keseluruhan unit-unit yang terkait di sekitar pembangunan tersebut. Hal ini menarik, karena menurut saya pribadi proses percepatan pembangunan ini dengan beberapa alasan yang akan saya utarakan telah memicu munculnya potensi disintegrasi.

Konsep Integrasi Dan Disintegrasi

Demi kemudahan dalam melihat letak kegagalan pembangunan yang memicu hadirnya potensi disintegrasi, maka penjelasan pertama akan saya mulai dari konsep integrasi itu sendiri. Menurut Howard Wriggins, terdapat sekurang-kurangnya lima faktor yang menentukan berhasilnya integrasi bangsa. Faktor-faktor itu adalah: (1) upaya penciptaan musuh bersama dari luar; (2) gaya politik para pemimpin yang memperkecil perbedaan, dan pemberian penghargaan serta rasa hormat terhadap semua suku bangsa yang berbeda-beda; (3) lembaga-lembaga politik, partai politik, dan birokrasi nasional, termasuk militer, yang aspiratif, luwes dan akomodatif terhadap perbedaan dan keanekaragaman daerah; (4) ideologi nasional yang menentukan tujuan dan cara-cara pencapaiannya; dan (5) pertumbuhan ekonomi yang didasarkan pada perluasan kesempatan bagi semua orang secara adil. Sedangkan disintegrasi sendiri di dalam *Webster's*

New Encyclopedic Dictionary 1996 difahami secara harfiah sebagai perpecahan suatu bangsa menjadi bagian-bagian yang saling terpisah.

Terkait dengan beberapa konsep integrasi di atas, saya mencoba mengaitkannya dengan fenomena percepatan pembangunan yang ada di Kotamadya Jambi, di mana proses percepatan pembangunan begitu sangat terasa dan sepiantas terlihat sangat berhasil dan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Namun apabila hal ini kita amati lebih lanjut ternyata pembangunan tersebut bukannya tidak memakan korban. Dan untuk menganalisa permasalahan tersebut, di sini saya akan lebih fokus kepada faktor ke 2 dan ke 5 dari pendapat Howard Wriggins .

Ketidakadilan Pembangunan Di Tengah Keragaman.

Kota Jambi terdiri dari susunan masyarakat yang multi etnis. Penduduk yang ada di kota ini terdiri suku yang datang dari berbagai penjuru Indonesia. Setidaknya ada 5 suku yang mendominasi jumlah penduduk di kota ini yaitu Jawa, Minang, Batak, Bugis dan Tionghoa, di samping orang Melayu Jambi asli.

Dari kacamata pembangunan yang saya lihat, hampir sebagian besar kegiatan perekonomian Jambi didominasi oleh masyarakat Tionghoa. Dan dengan anggapan bahwa masyarakat Tionghoa ini juga orang asli Indonesia dan tanpa sedikitpun niat mendiskreditkan sebuah ras, saya mengatakan bahwa disinilah letak potensi disintegrasi yang ada di kota Jambi.

Secara kasat mata saja memang sangat tampak bahwa gaya kepemimpinan Zulkifli Nurdin terlihat berat sebelah dalam menjalankan roda pembangunan. Karena jikalau pemerintah kala itu benar berniat menggiatkan pembangunan secara adil dan benar, seharusnya mereka memperhatikan kondisi riil masyarakatnya yang multi etnis.

Didalam buku *economic development* edisi keenam (1997), Michael P. Todaro mengungkapkan bahwa suatu negara (daerah) yang homogen secara etnis cenderung lebih makmur dibandingkan daerah lain yang multi etnis. Todaro mengambil contoh Eropa yang di dominasi oleh ras kulit putih dan mereka mampu berjaya dalam perekonomian. Oleh karena itu pembangunan sebuah daerah yang terdiri dari beragam etnis haruslah dikonsepsi secara lebih matang dan agak berbeda dibandingkan dengan konsep pembangunan modern yang ada. Konsep pembangunan tersebut harus mampu mengakomodir kepentingan semua etnis.

Hal inilah yang mungkin luput dari perhatian pemerintahan daerah Jambi. Pemerintah daerah Jambi gagal menciptakan sebuah konsep pembangunan yang rata dan adil. Mereka cenderung memilih jalan pintas dengan tetap mempertahankan dan mendukung *status quo*. Mereka lebih memilih untuk mempercepat pembangunan dengan memberi kemudahan bagi warga etnis Tionghoa untuk memacu ekonomi yang sebelumnya telah mereka bangun, ketimbang membangun ekonomi bertahap dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sebenarnya sejak masa sebelum Zulkifli Nurdin menjadi Gubernur Provinsi Jambi, perekonomian Jambi telah didominasi oleh etnis Tionghoa. Hanya saja kala itu perbedaan yang terjadi belum begitu mencolok. Dan ketika memasuki era kepemimpinan Zulkifli Nurdin yang langsung dengan gencarnya melaksanakan percepatan pembangunan, kesenjangan ini terus melebar dan semakin terasa begitu mencolok. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat ruko-ruko serta *mal* yang ada di Kotamadya Jambi yang sebagian besar memang dimiliki oleh warga Tionghoa.

Seharusnya dalam perencanaan pembangunan, pemerintah daerah Jambi terlebih dulu harus turut membantu memberikan peluang bagi warga etnis lain yang masih terseok-seok

perekonomiannya. Kenapa saya sebut membantu, karena dapat dikatakan bahwa masyarakat Kota Jambi di luar golongan etnis Tionghoa cenderung masih tertinggal. Oleh karena itu perlu perhatian khusus dari pemerintah.

Seorang ekonom ternama bernama Joseph E. Stiglitz di dalam bukunya *Making Globalization Work* mengatakan, arena potensial yang membutuhkan penanganan pemerintah sangatlah luas. Dewasa ini, hampir semua orang setuju bahwa pemerintah harus dilibatkan dalam penyediaan pendidikan dasar, kerangka hukum, infrastruktur, dan beberapa elemen dalam jaring pengaman sosial, dalam peraturan mengenai persaingan, peraturan perbankan, dan dampak lingkungan.

Dalam membangun asumsinya ini, Stiglitz menjadikan apa yang terjadi di Asia Timur sebagai contoh. Di sana, pemerintah bertanggung jawab dalam memenuhi tersedianya lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan secara aktif, dan pemerintah di negara tersebut tetap menaruh perhatian tentang ketidakadilan dan ketidakstabilan sosial. Bahkan di Malaysia, peran pemerintah diperluas ke arah lain. Dalam beberapa dekade belakangan pemerintah Malaysia melakukan program kegiatan yang agresif untuk membantu etnis Melayu.

Dilanjutkan oleh Stiglitz, hal ini adalah bagian yang penting dalam pembangunan bangsa. Pandangan bahwa semua kelompok (etnis) akan mendapatkan keuntungan dari masyarakat yang lebih stabil dan adil dapat diterima luas. Meskipun dengan adanya program itu, beberapa anggota masyarakat dari etnis China akan kehilangan kesempatan. Tetapi karena pemerintah memastikan bahwa kue pembangunan dapat dinikmati oleh semua masyarakat, konflik etnis dapat dihindari.

Namun hal ini tidak tampak dari *political will* para penguasa daerah Jambi. Sebagai contoh kecil, pemerintah daerah Jambi memberikan izin pendirian sebuah *mal* yang notabene

milik seorang etnis Tionghoa, tepat di sebelah pasar tradisional terbesar di kota jambi yang juga merupakan pusat perputaran ekonomi yang paling vital bagi masyarakat kecil di Jambi.

Hal ini tentu perlahan telah menciptakan kecemburuan sosial di dalam jiwa masyarakat lain terhadap masyarakat etnis Tionghoa. Apalagi pembangunan di sektor perekonomian modern ini turut mengabaikan perkembangan sektor-sektor vital lainnya, seperti sektor pendidikan dan ekonomi tradisional. Ini tentu membuat Jambi menjadi begitu rentan terhadap terjadinya konflik. Kenneth Boulding (1962) mendefinisikan konflik sebagai sebuah situasi persaingan antar pihak yang menyadari bahwa mereka memiliki potensi untuk tak selaras dalam posisi masing-masing di masa depan dan masing-masing menginginkan untuk menguasai atau merebut posisi yang tak selaras dengan keinginan pihak lain. Dengan beberapa alasan inilah dapat saya dikatakan bahwa telah muncul sinyal-sinyal pemicu disintegrasi di Kotamadya Jambi.

Fenomena Kecil Yang Menjadi Potensi Disintegrasi

Sinyal-sinyal terjadinya disintegrasi dapat diamati secara mikro melalui pergaulan sehari-hari yang ada di Kotamadya Jambi. Di sana terlihat jelas bahwa masyarakat Tionghoa cenderung tidak mampu berbaur dengan etnis lain secara harmoni dan terlihat seperti mengisolasi diri. Entah apa penyebab sebenarnya mereka menjauhkan diri. Namun sejauh yang pernah saya rasakan dan lihat adalah, di Jambi terjadi banyak pelecehan-pelecehan kecil terhadap etnis Tionghoa. Pelecehan-pelecehan ini sering terjadi di sekolah-sekolah. Masih melekat di dalam benak saya, bagaimana teman-teman saya yang berasal dari etnis Tionghoa sering mendapat perlakuan kasar yang kadang terjadi tanpa alasan yang jelas. Mereka diejek-ejek secara rasis,

dalam tahap yang parah mereka diasingkan dalam pergaulan dan seolah tidak dianggap oleh teman-teman sebayanya yang berasal dari etnis lain.

Mungkin karena hal tersebut, saat ini saya perhatikan masyarakat Tionghoa rata-rata memilih bersekolah di sekolah-sekolah swasta yang juga kepunyaan warga Tionghoa. Ini hal yang sangat memperhatikan, karena alangkah lebih baik apabila seluruh etnis di Jambi mampu berbaur, terutama di dalam instansi-instansi pendidikan di mana perputaran dinamika pemikiran terjadi begitu *intens*. Ini tentu berperan penting dalam membangun keselarasan dan toleransi terhadap perbedaan yang lahiriah telah ada.

Gejala lain yang menurut saya paling parah adalah sering terjadinya “penjarahan-penjarahan kecil” yang terjadi di ruko-ruko milik warga Tionghoa. Penjarahan kecil ini kerap kali terjadi juga dengan alasan yang tidak jelas. Terkadang pelaku melakukan hal tersebut hanya karena merasa mereka memiliki hak atas harta kepemilikan kaum Tionghoa tersebut, dan didukung dengan anggapan bahwa masyarakat Tionghoa tidak akan berani macam-macam terhadap mereka. Ini fakta yang begitu mengkhawatirkan, dan dengan adanya fakta yang miris ini, maka kedisharmonian yang menyebabkan disintegrasi sangat rentan terjadi di Kotamadya Jambi.

Epilog

Mengingat pentingnya pencegahan potensi-potensi disintegrasi di Provinsi Jambi terutama di Kotamadya Jambi, maka melalui esai yang sangat singkat ini saya ingin menyampaikan kepada pihak-pihak yang terkait, bahwa seharusnya sebuah perencanaan pembangunan haruslah terkonsep dengan matang dan dengan niatan yang benar-benar tulus untuk kepentingan orang banyak. Mengenai pemberian prioritas utama terhadap sesuatu yang

akan dibangun juga harus diperhatikan secara seksama. Di Provinsi Jambi, menurut saya ada baiknya pemerintah fokus terhadap pembangunan kualitas manusianya terlebih dahulu.

Dengan cara seperti itu, maka perhatian utama pemerintah terutama bagi Gubernur yang terpilih pada pemilu pada tahun ini adalah bagaimana memajukan dunia pendidikan baik dari segi kuantitas maupun kualitas, karena sektor inilah yang dapat menciptakan produk manusia-manusia yang unggul. Sebagaimana diketahui, selama ini sektor pendidikan di Jambi secara umum masih tertinggal jauh dibandingkan dengan daerah lain. Jambi hanya memiliki dua universitas negeri dengan cakupan jurusan yang masih minim dan tidak begitu sesuai dengan potensi daerah. Dan terbukti, kini angka pengangguran terdidik di daerah Jambi masih relatif tinggi. Data BPS 2010 menunjukkan angka pengangguran di Provinsi Jambi berjumlah 60.655 orang dari 1.350.761 orang jumlah angkatan kerja.

Hal ini penyebabnya bukanlah permasalahan minimnya lahan pekerjaan, karena Jambi adalah daerah yang memiliki kekayaan yang berlimpah dari sektor migas, perkebunan, pertanian, pariwisata, dan pertambangan. Pengangguran ini menurut saya lebih kepada belum terwujudnya bentuk keadilan dalam produk-produk kebijakan pemerintah. Dan dengan pembangunan yang giat di sektor pendidikan, maka hal ini tentu akan memberikan efek yang lebih besar, karena dengan kualitas manusia-manusia yang bagus maka segala sektor yang potensial otomatis akan bergerak dengan sendirinya.

Terakhir, untuk melengkapi masukan saya terhadap Pemerintah Daerah Provinsi Jambi, saya ingin mengutip pendapat dari Amartya Sen didalam buku *Development as Freedom* (1999), bahwa keberhasilan suatu kebijakan atau pertukaran ekonomi sangat ditentukan oleh

kepercayaan yang saling menguntungkan (*mutual trust*) yang bersumber dari norma-norma, baik eksplisit maupun implisit.